

Laporan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025
Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata

A. Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025

Hasil pengukuran kinerja Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata Triwulan III Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Target Triwulan III 2025	Realisasi s.d. Triwulan III 2025	Capaian (%)
I	Sasaran Program 1. Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Pengolahan yang Berkualitas					
1.1	Indikator 1.1 Peningkatan Nilai Tambah Bruto Industri Pengolahan	Persentase	5,5%	N/A*)	N/A**)	N/A
II	Sasaran Program 2. Terwujudnya Tenaga Kerja yang Produktif dan Berdaya Saing					
2.1	Indikator 2.1 Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja	Persentase	3,30%	2,86%	2,73%***)	82,72%
III	Sasaran Program 3. Terwujudnya Daya Saing Kawasan yang Mampu Mendorong Pertumbuhan Ekonomi					
3.1	Indikator 3.1 Jumlah Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang Berdaya Saing	Jumlah	4 KSEP dari 4 KSEP	3 dari 4 KSEP	3 dari 4 KSEP	75%
3.2	Indikator 3.2 Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN)	Persentase	83%	66%	33.33%	40,15%

IV	Sasaran Program 4. Terwujudnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pariwisata					
4.1	Indikator 4.1 Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman	Persentase	9,53%	N/A*)	8,04%	84,36%
4.2	Indikator 4.2 Pengeluaran Wisatawan Mancanegara (USD/Kunjungan)	Jumlah	USD 1.300 - 1.381,3	N/A*)	USD 1.199,71	86,85 - 92,29%
V	Sasaran Program 5. Terwujudnya Kebijakan Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas					
5.1	Indikator 5.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	4 dari 4 (Sangat efektif)	100%
VI	Sasaran Program 6. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas					
6.1	Indikator 6.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	Indeks	3 dari 4	N/A****)	N/A****)	N/A****)
VII	Sasaran Program 7. Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas					
7.1	Indikator 7.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi	Persentase	85%	63,75 %	63,75 %	75%

	Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata					
--	---	--	--	--	--	--

*) Tidak terdapat target triwulanan

**) Data BPS belum tersedia

***) Data BPS belum tersedia, diolah menggunakan proyeksi

****) Survei belum dilakukan pada Triwulan III dan akan dilaksanakan pada Triwulan IV

Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1	Sasaran Program 1: Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Pengolahan yang Berkualitas
----------	--

Pencapaian Sasaran Program 1: **Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Pengolahan yang Berkualitas** ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja: Peningkatan Nilai Tambah Bruto Industri Pengolahan.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1. Peningkatan Nilai Tambah Bruto Industri Pengolahan

Latar Belakang

Prioritas Nasional 5 (PN 5) dalam RPJMN 2025-2029 menargetkan terwujudnya peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri pengolahan melalui pembangunan fondasi industrialisasi yang bernilai tambah tinggi, terintegrasi, dan berdaya saing global. Keberhasilan sasaran ini diukur salah satunya melalui peningkatan nilai tambah bruto industri pengolahan. Untuk mendukung peningkatan nilai tambah bruto industri pengolahan, Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata berfokus pada koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan sektor industri pengolahan non-migas, dengan Kementerian Perindustrian sebagai *stakeholder* atau mitra kerja utama di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sementara industri pengolahan migas berada di bawah koordinasi Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pada tahun 2024, industri pengolahan mencatatkan kontribusi signifikan sebesar 18,98% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Industri Pengolahan non migas mencakup 16 sektor dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yaitu:

1. Industri Makanan dan Minuman
2. Industri Pengolahan Tembakau
3. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi
4. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki
5. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya

6. Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman
7. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional
8. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik
9. Industri Barang Galian bukan Logam
10. Industri Logam Dasar
11. Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik
12. Industri Mesin dan Perlengkapan
13. Industri Alat Angkutan
14. Industri Furnitur
15. Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan.

RPJMN tahun 2025-2029 menetapkan target peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai berikut: (i) Tahun 2025: 5,50% dan (ii) Tahun 2029: 8,14%. Untuk menetapkan target kontribusi tahunan pada periode antara tahun 2025 dan 2029, yaitu tahun 2026, 2027, dan 2028, dilakukan *forecasting* (peramalan) menggunakan deret waktu (*time series*) data lima tahun terakhir (2021 s.d. 2024). Berdasarkan analisis tersebut, diperoleh target kontribusi industri pengolahan terhadap PDB untuk tahun-tahun tersebut sebagai berikut: (i) Tahun 2026: 5,70%; (ii) Tahun 2027: 6,85%; dan (iii) Tahun 2028: 7,81%.

Kontribusi industri pengolahan dibagi menjadi dua, yaitu industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil (AKFT) dan industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka (LMATEA). Kontribusi industri AKFT meliputi 9 sub bidang industri pengolahan, antara lain (i) Industri makanan dan minuman; (ii) Industri Pengolahan Tembakau; (iii) Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman; (iv) Industri Furnitur; (v) Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional; (vi) Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik; (vii) Industri Barang Galian bukan Logam; (viii) Industri Tekstil dan Pakaian Jadi; (ix) Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki. Sedangkan kontribusi industri LMATEA meliputi 6 sub bidang industri pengolahan, antara lain (i) Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya; (ii) Industri Logam Dasar; (iii) Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik; (iv) Industri Mesin dan Perlengkapan; (v) Industri Alat Angkutan; dan (vi) Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan.

Target persentase realisasi indikator kinerja Peningkatan Nilai Tambah Bruto Industri Pengolahan tahun 2025 adalah sebesar 5.5%, yang diukur dengan formula berikut:

Peningkatan NTB Industri Pengolahan (%)

$$= \frac{\sum (NTB \text{ Industri Pengolahan } t - NTB \text{ Industri Pengolahan } t - 1)}{NTB \text{ Industri Pengolahan } t - 1}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Penetapan target kinerja tahun 2025 sebesar 5,5% didasarkan pada RKP 2025 dan dokumen RPJMN 2025-2029. Adapun target kinerja ini merupakan target tahunan sehingga tidak terdapat target triwulan.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Target Triwulan III	Realisasi	% Kinerja
IKU 1.1 Peningkatan Nilai Tambah Bruto Industri Pengolahan	Persentase	5,5%	N/A*)	N/A**)	N/A

*) Tidak terdapat target triwulanan

**) Data BPS belum tersedia

Persentase realisasi Peningkatan Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDB triwulan III tahun 2025 merupakan target tahunan sehingga target belum dapat tercapai. Sampai dengan dibuatnya laporan ini, BPS belum merilis *update* PDB triwulan III tahun 2025 sehingga realisasi pada triwulan III tahun 2025 belum dapat diperoleh.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2025 sebagai berikut:

1.1 Peningkatan Nilai Tambah Bruto Industri Pengolahan			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan
1	Penyusunan alternatif penyelesaian isu strategis dan permasalahan Industri pengolahan khususnya non-migas	Terlaksana	a. Pelaksanaan koordinasi terkait Industri Agro meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Industri Agro di Bali • Progress implementasi Peta Jalan Swasembada Gula • Tarif bea masuk komoditas Almond sebagai bahan baku industri

			<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan regulasi Permendag 17/2022 • Kebijakan industri hasil tembakau dan cukai hasil tembakau • Kebijakan cukai minuman berpemanis dalam kemasan • Optimalisasi fasilitas KITE untuk peningkatan Ekspor produk makanan dan minuman <p>b. Pelaksanaan koordinasi terkait Industri Industri Kimia dan Farmasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Implementasi Inpres 6/2016 • Workshop kondisi dan dampak penggunaan timbal • Koordinasi terkait progress revitalisasi dan pengembangan industri pupuk • Koordinasi penghentian impor limbah non B3 plastik daur ulang • Koordinasi terkait kondisi industri kaca lembaran nasional • Produk Viscose Stable Fiber (VSF) • Permasalahan Supply Demand Gas Industri • Monitoring dan evaluasi industri
--	--	--	--

			<p>Kimia Dalam Negeri</p> <p>c. Pelaksanaan koordinasi terkait Industri Tekstil meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sinkronisasi data impor atas produk TPT dan Alas Kaki • Pemberlakuan BMAD Impor Dumping Benang Filamen • Sosialisasi tata cara penerbitan Pertek Impor Tekstil dan Produk Tekstil <p>d. Menetapkan Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tim Revitalisasi Ekosistem Industri Tekstil dan Produk Tekstil Nasional</p> <p>e. Menetapkan Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan</p>
2	Penyusunan rekomendasi penyelesaian isu strategis dan	Terlaksana	<p>a. Koordinasi Penanganan Ulang dan Produk</p>

	permasalahan industri pengolahan khususnya non-migas.		<p>Terkontaminasi Cs-137</p> <p>b. FGD Strategi Pengembangan Industri Tekstil dan Pakaian Jadi</p> <p>c. Koordinasi Pengembangan Industri Pengolahan Rumput Laut di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara</p> <p>d. Kunjungan kerja ke Humbang Hasundutan dalam rangka mendukung penguatan ekosistem pertanian berbasis kemitraan melalui program link and match antara sektor industri dan pertanian</p> <p>e. Menghadiri peresmian Pabrik PT Lami Packaging Indonesia</p>
3	Pembahasan kendala/permasalahan dalam Penyelesaian Regulasi untuk Mendukung Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka	Terlaksana	<p>a. Telah dilaksanakan FGD “Diskusi Penyempurnaan Draft Rperpres dan Penyusunan Kebijakan Pengembangan Ekosistem Semikonduktor dan Teknologi Baru” Pada tanggal 26 September 2025.</p> <p>b. Pembahasan dan permohonan masukan terkait dengan <i>Zero Draft</i> Buku Putih dan RPerpres Pengembangan EKosistem Semikonduktor dan Teknologi Baru.</p> <p>c. Penyusunan <i>Joint Declaration of Intent</i></p>

			(JDol) <i>on the Trade Promotion Programme for Small and Medium-Sized Industries “Partnering in Business with Germany”</i> (PG) antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dengan Kementerian Urusan Ekonomi dan Energi (BMWE) Jerman.
--	--	--	---

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Perilisan Booklet *IAKFT Insight*
2. Koordinasi terkait formulasi kebijakan TKDN
3. Koordinasi terkait pengenaan tarif resiprokal AS
4. Koordinasi terkait kebijakan pengembangan industri halal
5. Pembahasan potensi kerja sama semikonduktor dengan United Kingdom (UK) *Embassy* pada tanggal 11 dan 15 September 2025.
6. Penjajakan kerjasama BtoB di Bidang semikonduktor dengan Hightech NL Belanda dengan fokus pada pengembangan ekosistem semikonduktor dengan penekanan aspek: (i) rantai pasok global; (ii) riset, inovasi dan pengembangan bisnis; (iii) *photonic integrated circuits (PIC)*; dan (iv) *enabling environment*.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan III tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya adalah:

1. Pelaksanaan rapat koordinasi, diskusi, dan audiensi menggunakan fasilitas ruang rapat kantor, selain itu efisiensi dilakukan pada anggaran konsumsi rapat. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan lain seperti monitoring dan evaluasi;
2. Pelaksanaan rapat koordinasi menggunakan fasilitas Zoom Meeting sesuai arahan pimpinan guna efisiensi anggaran yang masih dalam proses peninjauan ulang.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Kondisi ketidakstabilan geopolitik dan perang dagang global yang berdampak signifikan terhadap rantai pasok industri dalam negeri dan pangsa pasar ekspor nasional.

2. Keterbatasan ketersediaan data yang diperoleh dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Perindustrian, disebabkan oleh belum optimalnya mekanisme koordinasi internal di lingkungan unit terkait;
3. Perubahan struktur organisasi di seluruh K/L beserta penyesuaian nomenklatur yang berdampak pada efektivitas koordinasi antar K/L untuk beradaptasi terhadap arah kebijakan pemerintahan baru Presiden Prabowo.
4. Pemblokiran anggaran pada masa transisi nomenklatur dan struktur organisasi di seluruh K/L serta arahan efisiensi anggaran oleh Presiden yang menyebabkan beberapa kegiatan tertunda.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan III tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Dalam beberapa Rapat Koordinasi, kementerian teknis dan seluruh *stakeholder* terkait telah berupaya mendorong transformasi industri yang adaptif, inovatif, inklusif dan berkelanjutan.
2. Dalam rangka mitigasi dinamika perekonomian global akibat ketidakstabilan politik, perang dagang global, dan perubahan iklim global seluruh K/L dan *stakeholder* terkait berupaya menjaga stabilitas pemenuhan bahan baku, penguatan tata niaga impor dan peningkatan pangsa pasar ekspor.
3. Dalam rangka mengatasi hambatan akibat efisiensi anggaran, kami mengoptimalkan penggunaan fasilitas yang tersedia seperti melaksanakan rapat koordinasi, diskusi, dan audiensi menggunakan ruang rapat kantor dan/atau menggunakan fasilitas *Zoom online meeting* agar rencana aksi dapat tetap tercapai secara optimal. Selain itu, dilakukan penetapan revisi alokasi anggaran yang lebih dikontrol agar lebih optimal dan tepat sasaran sehingga rencana aksi dapat dicapai secara keseluruhan.
4. Melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Perindustrian sebagai prasyarat dalam setiap permintaan data berkala yang diterbitkan oleh unit dimaksud.

2

Sasaran Program 2: Terwujudnya Tenaga Kerja yang Produktif dan Berdaya Saing

Pencapaian Sasaran Program 2: **Terwujudnya Tenaga Kerja yang Produktif dan Berdaya Saing** ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja : Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1 Laju Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja

Latar Belakang

Pertumbuhan produktivitas tenaga kerja merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan daya saing nasional. Berdasarkan *Asian Productivity Organization* (2024), produktivitas tenaga kerja Indonesia yang diukur dari Produk Domestik Bruto per tenaga kerja tahun 2022 relatif rendah, yaitu sebesar US\$28.600 per pekerja. Angka tersebut masih

dibawah rata-rata kawasan ASEAN sebesar US\$30.200 per pekerja. Tantangan peningkatan produktivitas tenaga kerja di antaranya disumbang oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dicerminkan dari capaian rata-rata nilai *Programme for International Student Assessment* siswa Indonesia untuk semua aspek (membaca, matematika, dan sains) sebesar 369,3 pada tahun 2022. Angka tersebut menurun dibanding tahun 2018 dengan nilai rata-rata 382 serta masih tertinggal dibandingkan siswa dari negara-negara *The Organization for Economic Co- operation and Development* sebesar 488,33.

Pembangunan manusia unggul juga dihadapkan pada tantangan rendahnya daya saing tenaga kerja yang ditunjukkan dengan rendahnya kualifikasi pendidikan tenaga kerja. Berdasarkan pada kualifikasi pendidikan, data Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2024 menunjukkan sebesar 52,32 persen penduduk yang termasuk angkatan kerja merupakan lulusan pendidikan rendah (sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah sederajat ke bawah), sedangkan penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan menengah (sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan sederajat) sebesar 34,82 persen, dan penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan tinggi sebesar 12,86 persen. Kualifikasi pendidikan tenaga kerja yang rendah berdampak pada keterserapan tenaga kerja di pasar kerja, hanya 41,23 persen pekerja yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi. Oleh karena itu, untuk mencapai pembangunan yang optimal, Indonesia harus mampu mengatasi berbagai dampak risiko ini dan mendorong terciptanya ekosistem yang kondusif untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2025 sebesar 3,30% penetapan target tahun 2025 didasarkan pada RKP 2025 dan dokumen RPJMN 2025-2029. Adapun target triwulan III sebesar 2,86%.

Hingga Triwulan III Tahun 2025, Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja yang telah terealisasi sebesar 2,73% atau mencapai 95,47% dari target Triwulan III Tahun 2025 sebesar 2,86% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Target Triwulan III	Realisasi	% Kinerja
IKU 2.1 Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja	Persentase	3,30%	2,86%	2,73%*)	95,47%

*) Data BPS belum tersedia, diolah menggunakan proyeksi

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan III 2025 dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada

Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun 2025 sebagai berikut:

2.1 Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan
1.	Penyusunan rekomendasi penyelesaian isu strategis dan permasalahan dalam rangka peningkatan Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja	Terlaksana	<p>Untuk meningkatkan laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja dilakukan beberapa rencana aksi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam rangka meningkatkan perlindungan tenaga kerja platform, telah dilaksanakan FGD Arah Kebijakan dan Tata Kelola Pekerjaan Berbasis Platform Digital Dalam Rangka Menjaga Pertumbuhan Ekonomi. • Koordinasi percepatan transisi kartu prakerja; • Koordinasi penyusunan dan pengesahan PP 36/2025 tentang Perubahan atas PP 7 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Iuran JKK bagi Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Tahun 2025 • Menindaklanjuti Program Paket Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi dan telah diterbitkan Permenaker 8/2025 tentang

			Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi b. Diskon iuran JKK dan JKM untuk Ojek online, ojek pangkalan, supir, kurir, dan logistik. c. Perpanjangan diskon iuran JKK dan JKM untuk Petani, Pedagang, Nelayan, Buruh Bangunan, dan Pekerja Rumah Tangga d. Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan.
--	--	--	---

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Monitoring pelaksanaan penyaluran Bantuan Subsidi Upah dan Pemanfaatan program jaminan kehilangan pekerjaan.
2. Melakukan analisis pemetaan isu dan rekomendasi tindak lanjut yang diperlukan terkait kebijakan pekerja platform. Hasil analisis disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada 3 September 2025.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan III tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya, di antaranya:

1. Melakukan upaya efisiensi anggaran dengan melakukan lebih banyak proses koordinasi, sinkronisasi dan pemberian layanan melalui aplikasi *teleconference* seperti Zoom.
2. Telah dibuat tempat penyimpanan file berbasis *cloud* yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja sehingga meningkatkan kinerja.
3. Pengelolaan tata persuratan telah dilaksanakan secara digital sebagai bentuk kemudahan akses bekerja dan memberikan dampak pada efisiensi anggaran karena dinilai mengurangi belanja ATK.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Masih diperlukan pembahasan lebih lanjut untuk menajamkan isu-isu dan menemukan langkah konkrit untuk rekomendasi kebijakan bagi pekerja platform.
2. Masih terdapat beberapa isu tertunda yang perlu diputuskan oleh para Menteri (Komite Cipta Kerja) seperti kelembagaan program yang nantinya akan dituangkan dalam Perpres sehingga berdampak pada belum ditetapkannya regulasi Perpres Prakerja sebagai dasar implementasi pelaksanaan program Kartu Prakerja oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan III tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Melaksanakan rapat teknis dengan K/L terkait untuk menajamkan isu terkait pekerja platform.
2. Pelaksanaan Rapat Eselon 1 dan Rakor Menteri (Komite Cipta Kerja) untuk memutuskan berbagai isu tertunda dalam rangka percepatan pelaksanaan transisi program Kartu Prakerja ke Kementerian Ketenagakerjaan.

3

**Sasaran Program 3:
Terwujudnya Daya Saing Kawasan yang Mampu Mendorong
Pertumbuhan Ekonomi**

Pencapaian Sasaran Program 3: **Terwujudnya Daya Saing Kawasan yang Mampu Mendorong Pertumbuhan Ekonomi** ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja :

1. Jumlah Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang Berdaya Saing;
2. Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN).

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1 Jumlah Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang Berdaya Saing

Latar Belakang

Terwujudnya Daya Saing Kawasan yang Mampu Mendorong Pertumbuhan Ekonomi merupakan sasaran strategis yang bertujuan untuk mengembangkan kawasan-kawasan unggulan yang mendukung transformasi ekonomi nasional. Penguatan daya saing dilakukan melalui integrasi sektor industri, ketenagakerjaan, dan pariwisata secara terpadu dan berkelanjutan.

Indikator ini mengukur besarnya jumlah Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas (KSEP) yang telah dinyatakan selesai secara perencanaan dan siap untuk diimplementasikan. KSEP yang dimaksud merupakan kawasan yang telah difasilitasi percepatan pembangunannya melalui koordinasi lintas sektor oleh

Kementerian Koordinator, serta telah mendapatkan dukungan regulatif dan kebijakan dari instansi terkait.

KSE yang menjadi target merupakan KI, KEK, KSPN, dan/atau KPBPB yang diprioritaskan atau dipilih berdasarkan daftar KSE yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029. Pada tahun 2025 ini, terdapat 4 KSE Prioritas yang menjadi target dari 12 KSE yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029.

Kriteria kawasan strategis ekonomi yang diprioritaskan meliputi:

1. Keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029;
2. Mendukung kebijakan dan arahan Presiden;
3. Memberikan kontribusi terhadap peningkatan investasi;
4. Menjadi bagian dari program hilirisasi sumber daya alam.

Data yang digunakan bersumber dari antara lain:

1. Progres pelaksanaan KSE berdasarkan dengan data monitoring dan evaluasi;
2. Realisasi investasi dari Kementerian Investasi/BKPM;
3. Data Investasi dari Kementerian/Lembaga Teknis terkait (Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata, Badan Pengusahaan BBK dan/atau Dewan Kawasan BBK, dll); dan/atau
4. Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kawasan Ekonomi dari Badan Usaha Pengelola.

Tercapainya target atas Indikator “Jumlah Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang berdaya saing” didukung oleh dokumen berikut:

1. Dokumen Implementasi Kebijakan terkait Skema Pendanaan Infrastruktur (Perpres No. 66/2024 tentang HPT, Perpres No. 79/2024 tentang P3NK, SDG Indonesia One Fund, Strategi Pendanaan BUMN);
2. Nota Dinas Penyampaian Progres Peningkatan Nilai Investasi pada Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas;
3. Paparan terkait Progres Penyampaian Progres Peningkatan Nilai Investasi pada Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas;
4. Laporan Semester terhadap Hasil Evaluasi Penyampaian Progres Peningkatan Nilai Investasi pada Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas;
5. Laporan evaluasi Penyampaian Progres Peningkatan Nilai Investasi pada Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas;
6. Laporan kepada Presiden terhadap Penyampaian Progres Peningkatan Nilai Investasi pada Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas;
7. Kajian Dampak Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas terhadap nasional dan regional.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2025 sebesar 4 KSEP penetapan target tahun 2025 didasarkan pada RKP 2025 Adapun target triwulan III sebesar 3 KSEP dari 4 KSEP.

Pengukuran realisasi kinerja IKU Jumlah Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang Berdaya Saing didasarkan pada jumlah realisasi Kawasan Strategis ekonomi sebanyak 4 (empat) Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas.

Kriteria KSE yang berdaya saing memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Realisasi Investasi yang Berkelanjutan: Kawasan telah menunjukkan adanya investasi yang berkelanjutan, di mana pengembangan kawasan dilakukan secara konsisten melalui realisasi investasi secara kontinyu dalam pembangunannya.
2. Ketersediaan Aksesibilitas Eksternal: Kawasan memiliki akses yang memadai dari luar, termasuk ketersediaan jalan akses menuju kawasan serta keterhubungan dengan pelabuhan atau bandara sebagai bagian dari sistem logistik yang mendukung.
3. Keberadaan Badan Pengelola atau Investor: Terdapat badan pengelola kawasan atau pihak investor yang aktif berperan dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan.
4. Status Operasional dan Kesiapan Pembangunan: Kawasan telah siap beroperasi dan mendukung kegiatan pembangunan, ditunjukkan dengan kesiapan dalam menerima tenant serta telah terbangunnya infrastruktur dasar yang memadai di dalam kawasan.

Dalam hal, KSE yang ditargetkan belum memenuhi 4 kriteria yang ditentukan maka belum mencapai target yang ditentukan.

Hasil IKU ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$Total\ KSEP = \sum \text{Jumlah KSEP yang telah memenuhi kriteria dan beroperasi}$$

Hingga Triwulan III Tahun 2025, Jumlah Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang Berdaya Saing yang telah terealisasi sebesar 3 KSEP atau mencapai 100% dari target Triwulan III sebesar 3 KSEP dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Target Triwulan III	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.1 Jumlah Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang Berdaya Saing	KSEP	4 dari 4 KSEP	3 dari 4 KSEP	3 dari 4 KSEP	100%

Jumlah KSEP pada triwulan III didapatkan dari jumlah KSEP yang telah memenuhi kriteria dan beroperasi pada triwulan III tahun 2025. Penyelesaian Jumlah KSEP yang Berdaya Saing yang dicapai dalam target triwulan III tahun 2025 ini adalah jumlah KSEP yang telah selesai yaitu pengembangan Kawasan Industri Batang

dan Kawasan Ekonomi Khusus JIPE Gresik yang sudah dalam tahap penerbitan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) yang efektif.

Sampai dengan akhir Triwulan III, telah dilakukan sejumlah langkah strategis untuk mendorong percepatan pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas, antara lain:

1. Koordinasi dan monitoring dengan Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) untuk memastikan kepastian penyelesaian pembangunan di kawasan strategis.
2. Koordinasi terkait alokasi dan penyerapan anggaran pengadaan tanah bersama LMAN guna mendukung kelancaran pembangunan kawasan.
3. Koordinasi evaluasi proyek-proyek eksisting dan usulan baru yang berlokasi dalam kawasan prioritas, sebagai dasar pengambilan keputusan pengembangan ke depan.
4. Sosialisasi kepada pemerintah daerah guna membangun pemahaman dan dukungan terhadap arah pengembangan kawasan strategis.
5. Diseminasi capaian pengembangan kawasan melalui media nasional sebagai bentuk transparansi dan upaya meningkatkan partisipasi publik.

IKU Jumlah Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang Berdaya Saing ini merupakan suatu IKU baru di unit kerja sehingga masih belum terdapat perbandingan dengan pelaksanaan IKU sebelumnya. Namun, untuk pelaksanaan renaksi di IKU tersebut telah berhasil memenuhi target triwulan III tahun 2025 yang menjadi target.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2025 sebagai berikut:

3.1 Jumlah Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang Berdaya Saing			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan
1.	Rapat koordinasi terkait percepatan penyediaan infrastruktur di Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas serta mengeksplorasi skema pembiayaan yang dapat dimanfaatkan	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none">• Telah Rapat Pembahasan Publikasi dan Pengelolaan Dasbor Hasil JUTPI3 2025 di Wilayah Jabodetabek pada 23 Juli 2025• Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Subang Smartpolitan pada 23 Juli 2025

			<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Isu Working Group Batam Bintan Karimun pada 31 Juli 2025 • Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Proyek Strategis Nasional Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Bauksit PT Dinamika Sejahtera Mandiri pada 13 Agustus 2025
2.	Rapat koordinasi dengan K/L dan Pemda terkait progress percepatan pembangunan di Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Status dan Perkembangan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) pada 21 Juli 2025 • Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Subang Smartpolitan pada 23 Juli 2025 • Telah dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional Pembangunan Fly Over dari dan Menuju Terminal Teluk Lamong Provinsi Jawa Timur pada tanggal 2 Agustus 2025 • Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Proyek Strategis Nasional Proyek Pariwisata Seribu Pulau di Kepulauan Seribu pada 12 Agustus 2025 • Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Pelaksanaan Proyek

			<p>Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri (KI) Kumai Multi Energi di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah pada 12 September 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Lahan Kawasan Industri PSN pada Perpres Nomor 87 Tahun 2021 di Kabupaten Indramayu pada tanggal 3 September 2025 • Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Usulan Program Strategis Nasional Pengembangan PLTS Skala Besar di Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 17 September 2025. • Telah dilaksanakan Rapat Tindak Lanjut Kelengkapan Dokumen Usulan Program Strategis Nasional Pengembangan PLTS Skala Besar di Provinsi Kepulauan Riau pada 29 September 2025
3.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan/atau pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilaksanakan Rapat Monitoring Proyek Strategis Nasional (PSN) Program Pembangunan Smelter pada Kamis, 24 Juli 2025 • Telah dilaksanakan Rapat Monitoring Proyek Strategis Nasional (PSN) Sektor Energi - Proyek Pembangunan Jaringan Gas Kota pada 29 Juli 2025

			<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional Pembangunan Fly Over dari dan Menuju Terminal Teluk Lamong Provinsi Jawa Timur pada tanggal 2 Agustus 2025 • Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Monitoring, Evaluasi dan Rekonsiliasi Informasi Proyek Strategis Nasional Sektor Bendungan dan Irigasi pada 1 Agustus 2025 • Telah dilaksanakan Rapat Monitoring Proyek Strategis Nasional (PSN) Program Revitalisasi Industri Gula Nasional dan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit pada 7 Agustus 2025 • Telah dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Program PSN Pengembangan Jalan Perbatasan pada 10 September 2025
--	--	--	--

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pembahasan Petunjuk Teknis (Juknis) Land Value Capture 11 Juli 2025.
2. Telah dilaksanakan Diskusi Teknis Perencanaan Teknis Rencana Rinci Pembangunan KPBPB Bintan Wilayah Kab Bintan TA 2025 pada tanggal 29 Juli 2025.
3. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Isu Working Group Batam Bintan Karimun pada 31 Juli 2025.
4. Telah dilaksanakan Rapat Perumusan Rekomendasi DSDAN terkait Penerapan Smart Water Management (SWM) yang berbasis Digitalisasi untuk Pengelolaan Sumber Daya Air pada tanggal 2 September 2025.
5. Telah dilaksanakan Rapat Ke-2 – Penyusunan Rekomendasi DSDAN terkait Strategi untuk Meminimalkan Penggunaan Air Tanah pada tanggal 24 September 2025.

6. Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Teknis Integrasi Informasi Geospasial Tematik (IGT) pada tanggal 25 September 2025.
7. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan Permenko Perekonomian tentang Pedoman Pelaksanaan Pendanaan Penyediaan Infrastruktur melalui P3NK pada tanggal 29 September 2025.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan III tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya penggunaan aplikasi *teleconference* dalam melakukan rapat koordinasi pengembangan kawasan strategis ekonomi prioritas. Selain itu, pengelolaan persuratan secara digital yang diupayakan sebagai bentuk kemudahan akses bekerja juga memberikan kontribusi terhadap efisiensi anggaran karena dengan adanya digitalisasi maka mengurangi belanja alat tulis kantor.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut terdapat pada percepatan untuk pemenuhan persyaratan dasar dan perizinan usaha karena adanya perubahan struktur organisasi Kementerian/Lembaga terkait seperti Kementerian Kehutanan khususnya terkait pelepasan kawasan hutan.

Berdasarkan kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan III tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Dilaksanakannya rapat koordinasi untuk percepatan pengembangan kawasan strategis ekonomi prioritas;
2. Adanya monitoring dan evaluasi atas penyelesaian isu dalam pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan.

3.2 Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN)

Latar Belakang

Berdasarkan RPJMN Tahun 2025–2029, pembangunan nasional diarahkan pada pencapaian visi Indonesia Emas 2045 yang diterjemahkan ke dalam empat pilar pembangunan dan tujuh agenda pembangunan nasional. Ketujuh agenda tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas, yang mencakup aspek pembangunan sumber daya manusia, transformasi ekonomi, hingga penguatan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah.

Indikator Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) baru yang Siap Beroperasi mencerminkan capaian implementasi pembangunan infrastruktur nasional yang strategis sesuai target tahunan yang ditetapkan dalam RPJMN. Setiap proyek PSN harus tercantum dalam daftar proyek prioritas nasional dan pelaksanaannya dipantau oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) bersama kementerian/lembaga teknis terkait. Proyek-proyek ini

berperan penting dalam mendukung transformasi ekonomi, meningkatkan daya saing wilayah, serta mempercepat pemerataan pembangunan.

Kriteria Proyek Strategis Nasional (PSN) yang Dinyatakan Telah Selesai adalah sebagai Berikut:

1. Sektor Kawasan (contohnya Kawasan Industri):
Proyek dinyatakan selesai apabila telah memperoleh Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) yang berlaku secara efektif.
2. Sektor Transportasi, Energi, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dan Sanitasi:
Proyek dianggap selesai ketika telah memasuki tahap operasional atau mulai beroperasi secara fungsional.
3. Sektor Bendungan:
Proyek dikategorikan selesai saat dimulainya proses pengisian awal bendungan (*impounding*), setelah seluruh konstruksi bendungan dinyatakan tuntas.

Pencapaian terbangunnya PSN melibatkan koordinasi antara Kementerian atau Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, swasta, serta masyarakat, dengan pendekatan kolaboratif untuk memastikan kelancaran implementasi dan pencapaian output proyek sesuai jadwal. Berdasarkan Peraturan Presiden No.109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, serta pembaruan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024, daftar PSN terbaru mencakup 228 proyek dan 16 program yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Tercapainya target atas Indikator “Penyelesaian Proyek Strategis Nasional” didukung oleh dokumen berikut:

1. Dokumen Implementasi Kebijakan terkait Skema Pendanaan Infrastruktur (Perpres No.66/2024 tentang HPT, Perpres 79/2024 tentang LVC, SDG Indonesia One Fund, Strategi Pendanaan BUMN);
2. Nota Dinas Penyampaian Progres Penyelesaian Proyek Strategis Nasional;
3. Paparan terkait Progres Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (dalam bentuk PPT);
4. Laporan Semester KPPIP terhadap Hasil Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
5. Laporan evaluasi daftar Proyek Strategis Nasional (Laporan Tahunan);
6. Laporan Kepada Presiden terhadap Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
7. Penyusunan Project Completion Report (PCR);
8. Kajian Dampak PSN terhadap nasional dan regional.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2025 sebesar 83% penetapan target tahun 2025 didasarkan pada RKP 2025. Adapun target triwulan III sebesar 66%.

Formula pengukuran target penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) di tahun 2025 dihitung dengan membandingkan jumlah proyek yang berhasil diselesaikan dengan jumlah total proyek yang ditargetkan selesai pada tahun

tersebut. Hasil dari perhitungan ini menunjukkan persentase capaian realisasi proyek terhadap target yang telah ditetapkan dalam perencanaan triwulanan atau tahunan.

Cara Pengukuran target penyelesaian PSN di Tahun 2025:

1. Identifikasi PSN yang masuk ke dalam Major Project RPJMN;
2. Menentukan target jumlah PSN di tahun 2025 sebanyak 12 proyek,

Formula perhitungannya :

$$\text{Persentase Penyelesaian PSN} = \frac{\sum \text{proyek selesai}}{\sum \text{target proyek selesai}} \times 100\%$$

Hingga Triwulan III Tahun 2025, Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah terealisasi sebesar 33.33% atau mencapai 40,15% dari target Tahun 2025 sebesar 83% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Target Triwulan III	Realisasi	% Kinerja
IKU 3.2. Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN)	Persentase	83%	66%	33.33%	50,5%

Persentase penyelesaian PSN pada triwulan III didapatkan dari penyelesaian pembangunan 4 dari 12 proyek pada triwulan III tahun 2025. Pembangunan 4 dari 12 proyek ini memiliki nilai investasi sebesar Rp 61,085 Triliun. Pencapaian kinerja pada Triwulan III Tahun 2025 belum sesuai dengan target dikarenakan beberapa PSN masih dalam tahap konstruksi dan beroperasi sebagian. Namun, proses bisnis dalam Pembangunan PSN pada Triwulan III Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 77,5% dari target tahun 2025 sebesar 100%. Adapun 4 PSN yang telah didorong penyelesaiannya oleh Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata hingga triwulan III tahun 2025 antara lain

No.	Nama Proyek	Sektor	Nilai Investasi
1.	Kawasan Industri Penebang	Kawasan	Rp 49,21 Triliun
2.	Kawasan Industri Tanah Kuning	Kawasan	Rp 4,015 Triliun
3.	Pelabuhan Benoa	Pelabuhan	Rp 6,06 Triliun
4	Bendungan Merinting	Bendungan dan Irigasi	Rp 1,8 Triliun

Overview Proyek Strategis Nasional

Berdasarkan Permenko Nomor 12 Tahun 2024, terdapat 228 Proyek dan 16 Program sebagai PSN dengan potensi nilai investasi (Capex) Rp 6.480,5 Triliun*



Berdasarkan daftar proyek dalam Permenko Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam Daftar Proyek Strategis Nasional, sampai dengan Maret 2025, terdapat 228 proyek yang telah selesai dengan nilai investasi Rp 1.654,3 Triliun. Dari total 228 proyek, terdapat 114 Proyek sudah selesai sepenuhnya pada Desember 2024, 12 proyek ditargetkan selesai pada tahun 2025, dan 102 proyek ditargetkan selesai di atas 2025. Untuk memenuhi target tersebut, saat ini Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata mendorong 12 PSN agar dapat selesai di tahun 2025. Berikut merupakan daftar proyek yang ditargetkan selesai pada tahun 2025 sebagai berikut:

Daftar Proyek Strategis Nasional	Sektor
SPAM Benteng Kobema	Air Bersih Dan Sanitasi
SPAM Wasusokas	Air Bersih Dan Sanitasi
Bendungan Meninting	Bendungan dan Irigasi
Jalan Tol Sigli Banda Aceh	Jalan dan Jembatan
Pelabuhan Benoa	Pelabuhan
KI Kuala Tanjung	Kawasan
KI Bantaeng	Kawasan
KI Tanah Kuning	Kawasan
KI Kendari	Kawasan
KI Wiraraja Green Renewable Energy	Kawasan

KI Toapaya, Pulau Poto, Kampung Masiran	Kawasan
KI Pulau Penebang	Kawasan

Sampai dengan Triwulan III, telah dilakukan beberapa upaya dalam rangka pencapaian target Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN), antara lain:

1. Koordinasi dan Monitoring dengan PJPK terkait kepastian penyelesaian pembangunan PSN.
2. Koordinasi terkait alokasi anggaran dan penyerapan anggaran pengadaan tanah untuk PSN bersama LMAN.
3. Koordinasi evaluasi PSN eksisting dan usulan PSN Baru.
4. Sosialisasi kepada Pemerintah Daerah terkait Pembangunan PSN.
5. Sosialisasi capaian PSN melalui Media Nasional kepada masyarakat.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun 2025 sebagai berikut:

3.2 Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN)			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan
1.	Rapat koordinasi dan monitoring dengan <i>stakeholder</i> terkait penyerapan anggaran pengadaan tanah untuk PSN.	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Progres PSN di IKN yang Didanai oleh LMAN pada tanggal 29 Juli 2025 • Telah dilaksanakan Monthly Meeting Pendanaan Lahan PSN oleh LMAN (Juni-Juli 2025) Sektor Jalan Tol pada tanggal 20 Agustus 2025 • Telah dilaksanakan Monthly Meeting Pendanaan Lahan PSN oleh LMAN (Juni-Juli 2025) Sektor KA pada tanggal 21 Agustus 2025
2.	Rapat koordinasi dan monitoring dengan PJPK	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilaksanakan Rapat Monitoring Proyek Strategis Nasional (PSN) Sektor Energi - Proyek

	terkait kepastian penyelesaian pembangunan PSN		<p>Pembangunan Jaringan Gas Kota pada 29 Juli 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telah dilaksanakan Rapat koordinasi Monitoring, evaluasi dan rekonsiliasi informasi Proyek Strategis Nasional sektor bendungan dan irigasi pada tanggal 1 Agustus 2025 • Telah dilaksanakan Monitoring dan evaluasi Proyek Strategis Nasional pembangunan Flyover dari dan menuju terminal Teluk Lamong Provinsi Jawa Timur pada tanggal 2 Agustus 2025. • Telah dilaksanakan Rapat Monitoring Proyek Strategis Nasional Program Revitalisasi Industri Gula Nasional dan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit pada tanggal 7 Agustus 2025 • Telah dilaksanakan Rapat koordinasi Proyek Strategis Nasional pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian komoditas Bauksit PT Dinamika Sejahtera Mandiri pada tanggal 13 Agustus 2025 • Telah dilaksanakan Rapat Monitoring dan evaluasi Program PSN pengembangan Jalan Perbatasan pada tanggal 10 September 2025 • Telah dilaksanakan Rapat pembahasan pelaksanaan PSN Kawasan Industri Kumai Multi Energi di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah pada tanggal 12 September 2025
3.	Penyusunan Laporan	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilaksanakan Rapat pembahasan status dan

	Pelaksanaan PSN Semester 1 tahun 2025 kepada Presiden.		perkembangan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional pada tanggal 21 Juli 2025
4.	Implementasi skema alternatif pembiayaan infrastruktur (HPT dan/atau P3NK) pada infrastruktur yang tercantum dalam <i>list pilot project</i>	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> •Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan Permenko terkait Pendanaan Penyediaan Infrastruktur melalui Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan (P3NK) pada tanggal 23 September 2025 •Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan Permenko Perekonomian tentang Pedoman Pelaksanaan Pendanaan Penyediaan Infrastruktur melalui P3NK pada 29 September 2025
5.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan skema alternatif pembiayaan infrastruktur (HPT dan/atau P3NK)	Belum Terlaksana	Implementasi skema alternatif pembiayaan infrastruktur (HPT dan/atau P3NK) masih dalam penyusunan <i>list pilot project</i> dan penyusunan pedoman teknis dalam pelaksanaan skema alternatif ini agar dapat digunakan dengan baik dan efektif.
6.	Sosialisasi regulasi turunan alternatif pembiayaan infrastruktur (HPT dan/atau P3NK)	Terlaksana	Telah dilaksanakan sosialisasi Persiapan dan Identifikasi Potensi Lokasi Penerapan Skema Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan (P3NK) pada tanggal 25 dan 26 September 2025
7.	Sosialisasi capaian PSN melalui media nasional kepada masyarakat	Terlaksana	Telah dilaksanakan Sosialisasi Implementasi Hak Pengelolaan Terbatas Sesuai dengan Peraturan Presiden

			Nomor 66 Tahun 2024 pada tanggal 7 Agustus 2025
--	--	--	---

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan III tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya penggunaan aplikasi *teleconference* dalam melakukan rapat koordinasi pelaksanaan pembangunan PSN. Selain itu, pengelolaan persuratan secara digital yang diupayakan sebagai bentuk kemudahan akses bekerja juga memberikan kontribusi terhadap efisiensi anggaran karena dengan adanya digitalisasi maka mengurangi belanja alat tulis kantor.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Revisi Peraturan Presiden terkait KPPIP masih berada dalam tahap persiapan administratif dan koordinasi antarlembaga, sebelum dapat diajukan secara resmi.
2. Terdapat sejumlah kendala teknis dalam pelaksanaan, khususnya terkait permasalahan pengadaan lahan yang masih berlangsung, seperti tanah musnah, konsinyasi, tanah wakaf, tanah kas desa, lahan di kawasan hutan, serta tanah milik instansi. Permasalahan ini mencakup aspek regulasi maupun implementasi di lapangan.
3. Masih terdapat hambatan terkait kebutuhan tambahan anggaran atau pendanaan untuk sejumlah proyek.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan III tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Mengadakan rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait sebagai upaya untuk menyelaraskan substansi kebijakan, menghimpun masukan teknis, serta memastikan adanya dukungan dan kesepahaman lintas instansi terhadap arah perubahan kebijakan yang sedang disusun.
2. Melaksanakan koordinasi lanjutan apabila terjadi hambatan (*debottlenecking*) dalam proses pembahasan. Bila muncul kendala atau perbedaan pandangan, maka akan dilakukan dialog ulang dengan pihak terkait untuk mencari solusi yang konstruktif dan menjaga agar proses tetap berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan.
3. Diperlukan rapat koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait untuk membahas permasalahan pengadaan lahan dan perizinan yang masih menjadi kendala.
4. Perlu disiapkan skema pembiayaan alternatif guna mempercepat penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN).
5. Dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap penyelesaian isu yang muncul dalam pelaksanaan koordinasi dan harmonisasi kebijakan.

4

Sasaran Program 4: Terwujudnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pariwisata

Pencapaian Sasaran Program 2: **Terwujudnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pariwisata Saing** ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja :

1. Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman
2. Pengeluaran Wisatawan Mancanegara (USD/Kunjungan)

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1 Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman

Latar Belakang

Dalam konteks pertumbuhan ekonomi jangka menengah yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029, peningkatan kapasitas produksi melalui sektor-sektor produktif yang salah satunya adalah sektor pariwisata harus dilakukan secara simultan melalui strategi transformasi ekonomi. Dalam pengembangan sektor pariwisata, aspek utama yang menunjukkan perkembangan kinerjanya adalah penyediaan akomodasi makanan dan minuman. Sektor akomodasi makanan dan minuman merupakan sektor jasa yang diperkirakan akan terus tumbuh dan dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Kinerja sektor akomodasi makanan dan minuman dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas pariwisata baik dari wisatawan mancanegara maupun domestik.

Dalam penghitungannya sektor akomodasi makanan dan minuman mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi langsung. Sektor ini menjadi indikator kinerja utama dari sektor pariwisata dikarenakan sektor ini merupakan sektor dengan *share* atau kontribusi terbesar terhadap PDB (sebesar 2,64% pada tahun 2024) dibandingkan sektor lain yang terkait dengan pariwisata, seperti jasa perjalanan, hiburan yang masuk dalam sektor jasa lainnya (sebesar 2,05%).

Pertumbuhan sektor akomodasi makanan dan minuman merupakan persentase (%) peningkatan nilai tambah sektor akomodasi pada tahun tertentu (t1) yang dibandingkan dengan nilai tambah sektor akomodasi pada tahun sebelumnya (t-1). Persentase peningkatan nilai tambah sektor akomodasi makanan dan minuman diperoleh dengan mencari selisih antara PDB akomodasi makanan minuman pada tahun t1 dengan PDB akomodasi makanan minuman pada tahun t-1. Adapun formulasi penghitungan pertumbuhan sektor akomodasi makanan dan minuman adalah sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan PDBakmmt1} = [(PDBakmmt1 - PDBakmmt - 1) / PDBakmmt - 1] \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2025 sebesar 9,53% yang ditetapkan dalam dokumen RKP 2025 dan RPJMN 2025-2029. Adapun target ini merupakan target tahunan sehingga tidak terdapat target triwulanan.

Hingga Triwulan III Tahun 2025, Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman yang telah terealisasi sebesar 8,04% atau tercapai 84,36% dari target tahun 2025 sebesar 9,53% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Target Triwulan III	Realisasi	% Kinerja
IKU 4.1. Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman	Persentase	9,53%	N/A*)	8,04%	84,36%

*) Tidak terdapat target triwulanan

Capaian kinerja triwulan III 2025 sebesar 8,04% dari target tahun 2025 didukung oleh peningkatan kunjungan wisatawan domestik. Secara akumulatif, total kunjungan wisatawan domestik pada triwulan III 2025 telah mencapai 331,37 juta kunjungan, meningkat 22,32% dari triwulan III 2024. Peningkatan kunjungan ini dipengaruhi oleh perubahan preferensi wisatawan untuk memilih alternatif liburan yang lebih terjangkau sehingga berdampak pada penurunan minat terhadap perjalanan ke luar negeri dan meningkatnya ketertarikan terhadap destinasi domestik.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun 2025 sebagai berikut:

4.1 Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan
1.	Penyusunan rekomendasi penyelesaian isu strategis dan permasalahan terkait pertumbuhan sektor akomodasi makanan dan minuman	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> Kunjungan Lapangan ke Candi Prambanan dan Ratu Boko disertai Pembahasan RPermenko Tata Kelola Candi Borobudur pada 8-9 Juli 2025 Menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Progress dan Kendala yang dihadapi KEK Pariwisata Tahun 2025 pada 23 Juli, 13 Agustus, 21 Agustus,

			27 Agustus, dan 24 September 2025 <ul style="list-style-type: none"> • RDP Pembahasan DIM RUU Kepariwisata pada 25-27 Agustus 2025 • Rapat Stimulus Diskon Transportasi pada 26 September dan 29 September 2025
--	--	--	---

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan Diskusi Pengembangan Pariwisata Candi bersama Pusat Studi Pariwisata (Puspar) UGM.
2. Kunjungan ke Kampung Wisata Purbayan, Yogyakarta.

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan diatas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut:

1. Membahas masalah yang ada dan potensi yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pariwisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan.
2. Mendiskusikan masukan berbasis riset mengenai tren pariwisata, daya dukung lingkungan dan sosial, serta model bisnis berkelanjutan untuk sektor amenitas di sekitar destinasi utama seperti candi.
3. Mengamati kondisi riil salah satu DTA Pariwisata di Kawasan Borobudur-Yogyakarta-Prambanan.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan III tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya pada Triwulan III tahun 2025 adalah penggunaan aplikasi *teleconference* dalam melakukan rapat koordinasi pemetaan isu serta pengumpulan data dan informasi sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar 20 juta rupiah. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan rapat koordinasi atau monitoring evaluasi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya. Selain efisiensi pada operasional rencana aksi, pengelolaan persuratan secara digital juga diupayakan untuk meningkatkan kemudahan akses bekerja sekaligus memberikan kontribusi terhadap efisiensi anggaran melalui pengurangan belanja alat tulis kantor.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Kendala utama dalam pencapaian target Triwulan III Tahun 2025 adalah terjadi ketidaksinkronan dalam penyusunan aturan pembangunan Kompleks TWC/TWB dan tata kelola destinasi wisata yang belum terintegrasi secara optimal sehingga menyebabkan berbagai masalah di lapangan yang secara kolektif menurunkan mutu destinasi.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan III tahun 2025, maka disusun beberapa rekomendasi perbaikan untuk menarik kunjungan wisatawan mancanegara. Upaya diplomasi dan kerja sama internasional menjadi langkah penting untuk memperluas pasar pariwisata Indonesia, antara lain melalui melakukan rapat koordinasi untuk menyisir pasal-pasal dalam aturan yang menghambat pengembangan kawasan dan mengikuti diskusi untuk mendorong stimulus wisata.

4.2 Pengeluaran Wisatawan Mancanegara (USD/Kunjungan)

Latar Belakang

Angka capaian rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara diperoleh dari perhitungan *Average Spending Per Arrival* (ASPA) wisatawan mancanegara dari data yang diperoleh dari BPS. Pengeluaran atau pengeluaran wisatawan mancanegara adalah jumlah pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan selama melakukan perjalanan. Pengeluaran wisatawan mancanegara antara lain untuk akomodasi, makan minum, penerbangan domestik, transportasi lokal, belanja, cinderamata, hiburan, kesehatan/ kecantikan, kursus/ pelatihan, rekreasi, paket wisata lokal, jasa pemandu wisata, dan pengeluaran lainnya. Data rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara terdapat dalam statistik pengeluaran wisatawan mancanegara, yang dipublikasikan oleh BPS.

Data rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara per kunjungan diperoleh dari hasil *Passenger Exit Survey* (PES) yang dilakukan dengan wawancara langsung terhadap responden (wisatawan mancanegara) menggunakan *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) di pintu keberangkatan internasional bandar udara/pelabuhan/pos lintas batas.

Adapun formula perhitungan rata - rata pengeluaran wisatawan mancanegara adalah sebagai berikut

$$\text{Rata - rata pengeluaran wisatawan mancanegara} = \frac{\text{Total Pengeluaran Wisman hasil survey}}{\text{Jumlah Wisman yang disurvey}}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2025 sebesar USD 1.300 – 1.381,3. Penetapan target tahun 2025 didasarkan pada RKP 2025 dan dokumen RPJMN 2025-2029. Adapun target ini merupakan target tahunan sehingga tidak terdapat target triwulanan.

Hingga Triwulan III Tahun 2025, Pengeluaran Wisatawan Mancanegara (USD/Kunjungan) yang telah terealisasi sebesar USD 1.199,71 atau mencapai 86,85 - 92,29% dari target Tahun 2025 sebesar USD 1.300 – 1.381,3 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Target Triwulan III	Realisasi	% Kinerja
IKU 4.2 Pengeluaran Wisatawan Mancanegara (USD/Kunjungan)	Mata Uang (USD)	USD 1.300 - 1.381,3	N/A*)	USD 1.199,71	86,85 - 92,29%

*) Tidak terdapat target triwulanan

Capaian rata - rata pengeluaran wisatawan mancanegara pada triwulan III 2025 yang mencapai USD 1.199,71 didukung oleh peningkatan daya saing dan kualitas destinasi wisata di Indonesia. Kondisi ini tercermin dari jumlah wisatawan mancanegara pada triwulan III 2025 yang mencapai 3,69 juta kunjungan, meningkat 13,96% dari triwulan III 2024. Pada triwulan III, telah tercapai 86,85 - 92,29% dari target tahun 2025 yang didukung oleh adanya musim liburan musim panas di negara-negara sumber wisatawan mancanegara utama (seperti Eropa dan Australia), yang cenderung mendorong durasi tinggal dan pengeluaran yang lebih tinggi. Peningkatan kualitas pariwisata di Indonesia juga turut mempengaruhi durasi dan pengeluaran wisatawan mancanegara.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun 2025 sebagai berikut:

4.2 Pengeluaran Wisatawan Mancanegara (USD/Kunjungan)			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Penyusunan Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis dan Permasalahan terkait Pengeluaran Wisatawan Mancanegara	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> Diskusi Potensi Pengembangan Pariwisata bersama ADB pada 1 Juli, 11-15 Agustus, 19-22 Agustus, 26-30 Agustus, 5 September, 11 September, dan 26 September 2025 Penghitungan Indikator Quality Tourism pada 16 Juli, 25 Juli, 30-31 Juli, 4 Agustus, 12-15 Agustus, 8-9 September, dan 23-27 September

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah melaksanakan Pembahasan

Pendalaman Kerja Sama Perdagangan dan Investasi Indonesia-Tiongkok serta melaksanakan Rapat Insentif Perfilman untuk Mendorong Insentif Pariwisata.

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan diatas, diperoleh hasil atau capaian berupa pemetaan potensi kerjasama bilateral Indonesia-Tiongkok, termasuk salah satunya pada sektor pariwisata, untuk lebih menarik wisatawan Tiongkok ke Indonesia, serta pembahasan potensi skema insentif pemerintah untuk menarik produksi film internasional di wilayah Indonesia.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan III tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya pada Triwulan III tahun 2025 adalah penggunaan aplikasi *teleconference* dalam melakukan rapat koordinasi pemetaan isu, serta pengumpulan data dan informasi sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar 20 juta rupiah. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan rapat koordinasi atau monitoring evaluasi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya. Selain efisiensi pada operasional rencana aksi, pengelolaan persuratan secara digital juga diupayakan untuk meningkatkan kemudahan akses bekerja sekaligus memberikan kontribusi terhadap efisiensi anggaran melalui pengurangan belanja alat tulis kantor.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Hingga Triwulan III Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Kendala utamanya adalah pengembangan destinasi dan atraksi wisata yang belum optimal, sehingga menyebabkan adanya *over tourism* dan ketidakpatuhan pada prinsip berkelanjutan dan juga kesulitan dalam pengumpulan data indikator QT karena keterbatasan sumber yang ada.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan III tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Penyelesaian permasalahan pengembangan destinasi dan atraksi wisata. Dengan Mengajak lembaga *think-tank* internasional, seperti ADB, untuk membantu pengembangan destinasi pariwisata regeneratif, seperti Jakarta dan Bali.
2. Permasalahan pengumpulan data indikator QT dapat diselesaikan dengan bersurat kepada K/L terkait pengumpulan data QT yang tidak publik dan/atau menggunakan pendekatan lain.

Pencapaian Sasaran Program 5: **Terwujudnya Kebijakan Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas** ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja : Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1 Indeks

Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata

Latar Belakang

Indeks Efektivitas SKP merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan bidang perekonomian. Proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 (empat) proses tahapan, yakni (i) Identifikasi Permasalahan, (ii) Penyusunan Alternatif Rekomendasi, (iii) Formulasi Kebijakan, serta (iv) Monitoring dan Evaluasi. Adapun rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Deputi di antaranya **rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan kelembagaan, rancangan perencanaan program, rancangan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan)**. Isu strategis yang termasuk dalam Indeks Efektivitas SKP di lingkup Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata adalah:

1. Pengembangan Industri Logam, Mesin Alat Transportasi, Elektronik dan Aneka
2. Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi dan Tekstil
3. Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan
4. Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Program Strategis
5. Pengembangan Pariwisata.

Indeks Efektivitas sinkronisasi, koordinasi, serta pengendalian kebijakan di bidang perekonomian diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan pada setiap indikator *internal business* yang diampu oleh unit kerja dibawahnya (Asisten Deputi) dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/Permasalahan

Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (*agenda setting*).

2. Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan *stakeholder* terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan

dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputi dan *stakeholder* terkait selanjutnya menjadi *input* dalam tahapan selanjutnya.

3. Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh *stakeholder* dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

4. Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permenko/Kepmenko) atau K/L terkait. Apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, unit kerja pada melakukan uji coba atau *piloting*, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan. Adapun kegiatan monitoring yang bersifat general adalah pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Nilai Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan perekonomian didapat dengan didasarkan pada nilai indeks efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan yang terdapat pada seluruh asisten deputi dan dihitung dengan formulasi berikut:

Indeks efektivitas SKP =

$$\sqrt[5]{SKP_{AD\ 1} \times SKP_{AD\ 2} \times SKP_{AD\ 3} \times SKP_{AD\ 4} \times SKP_{AD\ 5}}$$

Nilai Akhir Indeks efektivitas SKP digunakan untuk menentukan hasil akhir dari keberhasilan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian di bidang industri, ketenagakerjaan, dan pariwisata.

Hasil indeks SKP lalu dikonversikan ke skala, dengan rincian sebagai berikut:

Sangat Efektif (4), rentang nilai 91 - 100

Efektif (3), rentang nilai 81 - 90

Cukup Efektif (2), rentang nilai 71 - 80

Kurang efektif (1), rentang nilai < 70

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2025 sebesar 3 dari 4 penetapan target tahun 2025 didasarkan pada tren-tren pada tahun sebelumnya. Adapun target triwulan III ditetapkan dengan nilai yang sama.

Hingga Triwulan III Tahun 2025, Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan

Pariwisata yang telah terealisasi sebesar nilai indeks 4 atau mencapai 133,43% dari target Triwulan III sebesar 3 dari 4 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Target Triwulan III	Realisasi	% Kinerja
IKU 5.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	4 (Sangat efektif)	133,43%

Perhitungan realisasi tersebut didasarkan atas pencapaian efektivitas pelaksanaan KSP di masing-masing Asisten Deputi dibawah lingkup Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata. Pada triwulan III 2025, setiap Asisten Deputi telah melakukan proses KSP secara efektif yang dibuktikan dengan nilai efektivitas sebesar 100. Adapun isu strategis terkait pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis menjadi isu yang dikoordinasikan paling efektif dibandingkan dengan isu lainnya dengan nilai 120,83. Ringkasan realisasi nilai efektivitas KSP untuk masing-masing Asisten Deputi dan perhitungan nilai Indeks Efektivitas KSP Kedeputian adalah sebagai berikut:

No.	Isu Strategis	Realisasi TW II
1.	Pengembangan Industri Logam, Mesin Alat Transportasi, Elektronik dan Aneka	109,55
2.	Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi dan Tekstil	100,00
3.	Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan	100,00
4.	Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis	120,83
5.	Pengembangan Pariwisata	111,42

$$\text{Indeks KSP Deputi} = \sqrt[5]{109,55 \times 100,00 \times 100,00 \times 120,83 \times 111,42} = 108,08$$

Hasil akhir nilai Indeks KSP Deputi adalah 108,08 yang berada pada rentang sangat efektif (nilai Indeks 4).

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun 2025 sebagai berikut:

5.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan
1.	Penyusunan Rekomendasi kebijakan Peningkatan Nilai Tambah Bruto Industri Pengolahan	Terlaksana	Telah dilaksanakan berbagai rapat koordinasi, pertemuan, diskusi, maupun audiensi, antara lain: <ul style="list-style-type: none">• Audiensi dengan beberapa pelaku Industri Hasil Tembakau:<ol style="list-style-type: none">a. Audiensi dengan PT HM Sampoerna tanggal 26 Juni 2025 untuk mengetahui perkembangan isu-isu terkait kebijakan IHT dan tindak lanjut;b. Audiensi dengan PT Bentoel tanggal 22 Juli 2025 yang bertujuan membahas perkembangan IHT;c. Audiensi dengan PT Nojorono Tobacco International tanggal 15 Agustus 2025 untuk mendiskusikan terkait terbitnya Permenko Bidang PMK No 2 Tahun 2025 tentang Koordinasi Penetapan Batas Nikotin dan Tar;

			<p>d. Audiensi dengan PT Tri Sakti Purwosari Makmur (TSPM KT&G) tanggal 11 September 2025 untuk membahas dinamika perkembangan kebijakan Industri Hasil Tembakau (IHT) dan mengidentifikasi potensi dampaknya pada aspek ekonomi, sosial dan kesehatan nasional.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diskusi terkait Kebijakan Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan dengan Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai, Kemenkeu tanggal 19 Agustus 2025; • Audiensi dengan PT PepsiCo Indonesia Food & Beverages yang bertujuan untuk membahas Program Kemitraan Pertanian PepsiCo dan Petani Lokal; • Terlibat dalam Rapat Koordinasi Penyediaan Bahan Baku Industri Tepung Tapioka PT Nutrindo Boga Rasa (Mayora Group) tanggal 1 Agustus 2025 untuk membahas terkait penyediaan bahan baku industri tepung tapioka di Provinsi Sulawesi Selatan. • Terlibat dalam Kegiatan Temu Pakar: Peremajaan Perkebunan Kakao
--	--	--	---

			<p>Rakyat tanggal 26 Agustus 2025 bertujuan untuk mensosialisasikan dan jaring masukan program Peremajaan Perkebunan Kakao Rakyat (PAKAR) BPDP sebagai upaya mendorong pengembangan kakao untuk meningkatkan nilai tambah dan keberlanjutan industri kakao di Indonesia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diskusi Pengembangan Industri Pengolahan Rumput Laut di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara tanggal 1 September 2025 untuk memperoleh informasi terkait pengembangan industri pengolahan rumput laut di Kabupaten Nunukan. • Kunjungan Lapangan ke Taman Sains Teknologi Herbal dan Hortikultura (TSTH2) tanggal 19 September 2025. • Mengikuti rapat koordinasi Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital tanggal 12 September 2025 tentang pembahasan hambatan ekspor dan rencana re-impor produk udang Indonesia di AS. • Rapat Pembahasan Mekanisme dan Kementerian Koordinator Pengampu terkait Revisi Kepmenko Nomor 418 Tahun 2023 tanggal 16 Juli 2025.
--	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilaksanakan koordinasi untuk pemenuhan bahan baku industri logam dan mesin, diantaranya: <ol style="list-style-type: none"> a. Pembahasan Inpres 6/2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan yang masih relevan dengan kebijakan industri saat ini. b. Rapat Pembahasan Peran Toko Daring dalam PBJ Pemerintah: rapat ini dilaksanakan dalam rangka tindak lanjut FGD Alsintan. c. Monitoring dan Evaluasi (Monev) terkait Penanganan Udang dan Produk Terkontaminasi Cs-137. • Telah dilaksanakan koordinasi untuk pemenuhan bahan baku industri elektronika, yakni Rapat Koordinasi Penetapan Daftar Proyek Relaksasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya). • Telah dilaksanakan koordinasi untuk pemenuhan bahan baku industri alat transportasi, diantaranya: Diskusi bersama Hyundai dan kunjungan lapangan ke PT HLI Green Power sebagai salah satu produsen baterai
--	--	--	---

			kendaraan listrik di Indonesia. PT HLI fokus memproduksi sel baterai NCM.
2.	Penyusunan Rekomendasi Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja	Terlaksana	<p>Telah dilaksanakan berbagai rapat koordinasi, pertemuan, diskusi, maupun audiensi, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telah dilaksanakan pertemuan dengan Secretary-General of the Asian Productivity Organization (APO) dan tim. Rapat dilaksanakan untuk membahas National Productivity Masterplan yang telah disusun dengan Bappenas dan tindak lanjutnya. Indonesia's National Productivity Master Plan 2025–2029 secara garis besar berisikan bagaimana melakukan lompatan pertumbuhan ekonomi 8% yang tidak hanya berfokus pada sektor capital saja melainkan dari sisi produktivitas • Telah disusun Laporan Program JobStart Indonesia sebagai bagian dari Technical Assistance yang diberikan oleh ADB dalam rangka pelaksanaan Policy Action 3.4 atas Policy Based Loan – Boosting Productivity Human Capital Development Program Subprogram • Telah dilakukan beberapa rapat teknis terkait keberlanjutan program JobStart

			Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan telah menetapkan Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Khusus, di mana memiliki program kerja yang khusus menyasar kepada kelompok rentan termasuk muda rentan. Hal ini sejalan dengan program JSI yang menargetkan kepada NEET
3.	Penyusunan Rekomendasi Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang berdaya saing	Terlaksana	<p>Telah dilaksanakan berbagai rapat koordinasi, pertemuan, diskusi, maupun audiensi, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pembahasan Petunjuk Teknis (Juknis) Land Value Capture pada tanggal 11 Juli 2025 • Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Publikasi dan Pengelolaan Dasbor Hasil JUTPI3 2025 di Wilayah Jabodetabek pada tanggal 23 Juli 2025 • Telah dilaksanakan Diskusi Teknis Perencanaan Teknis Rencana Rinci Pembangunan KPBPB Bintan Wilayah Kab Bintan TA 2025 pada tanggal 29 Juli 2025 • Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan Permenko Perekonomian tentang Pedoman Pelaksanaan Pendanaan

			<p>Penyediaan Infrastruktur melalui P3NK pada 29 September 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Publikasi dan Pengelolaan Dasbor Hasil JUTPI3 2025 di Wilayah Jabodetabek pada 23 Juli 2025 • Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Lahan Kawasan Industri PSN pada Perpres Nomor 87 Tahun 2021 di Kabupaten Indramayu pada tanggal 3 September 2025 • Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan Permenko terkait Pendanaan Penyediaan Infrastruktur melalui Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan (P3NK) pada tanggal 23 September 2025 • Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Perkembangan Kawasan Industri di Batam pada 10 Juli 2025 • Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Status dan Perkembangan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) pada 21 Juli 2025 • Rapat Perkembangan Usulan Tambahan
--	--	--	--

			<p>Pendanaan</p> <p>Pengadaan Tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tanggal 29 Juli 2025</p>
4.	<p>Penyusunan Rekomendasi Penyelesaian PSN</p>	<p>Terlaksana</p>	<p>Telah dilaksanakan berbagai rapat koordinasi, pertemuan, diskusi, maupun audiensi, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Status dan Perkembangan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) pada 21 Juli 2025 • Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Subang Smartpolitan pada 23 Juli 2025 • Telah dilaksanakan Rapat Monitoring Proyek Strategis Nasional (PSN) Sektor Energi - Proyek Pembangunan Jaringan Gas Kota pada 29 Juli 2025 • Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Monitoring, Evaluasi dan Rekonsiliasi Informasi Proyek Strategis Nasional Sektor Bendungan dan Irigasi pada 1 Agustus 2025 • Telah dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Program

			Pembangunan Smelter pada tanggal 14 Agustus 2025
5.	Penyusunan Rekomendasi kebijakan Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Kunjungan Lapangan ke Candi Prambanan dan Ratu Boko disertai Pembahasan RPermenko Tata Kelola Candi Borobudur pada 8-9 Juli 2025 • Menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Progress dan Kendala yang dihadapi KEK Pariwisata Tahun 2025 pada 23 Juli, 13 Agustus, 21 Agustus, 27 Agustus, dan 24 September 2025 • RDP Pembahasan DIM RUU Kepariwisataaan pada 25-27 Agustus 2025 • Rapat Stimulus Diskon Transportasi pada 26 September dan 29 September 2025
6.	Penyusunan Alternatif Rekomendasi kebijakan Pengeluaran Wisatawan Mancanegara	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Diskusi Potensi Pengembangan Pariwisata bersama ADB pada 1 Juli, 11-15 Agustus, 19-22 Agustus, 26-30 Agustus, 5 September, 11 September, dan 26 September 2025 • Penghitungan Indikator Quality Tourism pada 16 Juli, 25 Juli, 30-31 Juli, 4 Agustus, 12-15 Agustus, 8-9 September, dan 23-27 September • Rapat Koordinasi pembahasan konektivitas 30 Juli, 16 September, 26 dan 29

			September.
--	--	--	------------

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah melakukan koordinasi yang intensif dengan stakeholder terkait guna mendapatkan gambaran yang komprehensif terkait permasalahan yang dihadapi dan mendiskusikan solusi terhadap masalah tersebut.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan III tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya melakukan optimalisasi pelaksanaan rapat – rapat koordinasi dengan menggunakan media daring sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp 10.000.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan dukungan layanan pimpinan yang akan dilakukan pada periode triwulan IV.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Penyesuaian kembali pelaksanaan sistem kerja setelah adanya kebijakan buka blokir anggaran.
2. Belum optimalnya koordinasi lintas K/L atau pihak terkait atas tindak lanjut terhadap hasil kegiatan rapat koordinasi, serta monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan III tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Perubahan atau penambahan rencana aksi berupa pelaksanaan rakor penyelesaian isu strategis.
2. Penguatan koordinasi lintas K/L atau pihak terkait atas tindak lanjut hasil kegiatan rapat koordinasi, serta monitoring dan evaluasi.

6

Sasaran Program 6:

Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 6: **Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas** ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja : Indeks Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

6.1 Indeks Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata yang Berkualitas

Latar Belakang

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Deputi dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/*Stakeholder* terkait. Survei yang dilakukan adalah survei skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survei akan dilakukan dengan menggunakan *Google Form*.

Nilai Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata diperoleh dari rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden, dengan empat kategori penilaian, yaitu:

1. Sangat Puas (4), rentang nilai 3.51 s.d 4
2. Puas (3), rentang nilai 3.01 s.d 3.50
3. Tidak Puas (2), rentang nilai 2.51 s.d 3.00
4. Sangat Tidak Puas (1), rentang nilai <2.50

Formula perhitungan indeks tersebut adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &\text{Indeks Kepuasan} \\ &\text{Layanan Sinkronisasi,} \\ &\text{Koordinasi, dan Pengendalian} \end{aligned} = \frac{(\text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep})}{5}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Pelaksanaan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/*Stakeholder* dilakukan dalam periode semesteran sehingga survei terkait belum dilakukan pada Triwulan III dan akan dilaksanakan pada Triwulan IV.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Target Triwulan III	Realisasi	% Kinerja
IKU 6.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan	Indeks	3 dari 4	N/A*)	N/A*)	N/A

an, dan Pariwisata					
-----------------------	--	--	--	--	--

*) Survei belum dilakukan pada Triwulan III dan akan dilaksanakan pada Triwulan IV

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun 2025 sebagai berikut:

6.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan
1.	Tindak lanjut hasil survei Semester I dan persiapan Survei Kepuasan Kualitas Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Semester II	Terlaksana	Penyiapan survei telah dilakukan melalui penyusunan daftar pertanyaan responden survei dan penentuan responden Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang melibatkan setiap PIC di keasdepan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah melakukan *benchmarking* secara informal dengan unit kedeputan lain mengenai Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian pada masing-masing unit kerja tersebut.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan III tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya kegiatan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian masing-masing unit kerja juga memanfaatkan aplikasi *video conference* seperti zoom meeting sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan dapat menghemat anggaran konsumsi rapat sebesar Rp 2.400.000 (untuk 1x rapat dengan asumsi peserta sebanyak 30 orang). Selain itu, survei dibuat dalam bentuk *google form* sebagai efisiensi, sehingga tidak diperlukan pencetakan bahan. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk anggaran kegiatan yang lebih membutuhkan seperti melakukan monitoring langsung ke lapangan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, tidak ada kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Namun tetap disusun upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai.

7

Sasaran Program 7:

Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 7: **Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas** ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja : Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

7.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata

Latar Belakang

Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan/atau RB Tematik di Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata pada tahun 2025 adalah sebesar 85%. Adapun target triwulan III sebesar 60%.

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata merupakan persentase pemenuhan bukti dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputy. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Deputy didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata. Implementasi kegiatan RB General dan/atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun. Jumlah minimum IKU RB yang wajib didukung adalah SAKIP, Indeks Digitalisasi Arsip, Indeks Kualitas Kebijakan, dan Tingkat Implementasi Sistem Kerja.

Hingga Triwulan III Tahun 2025, Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang telah terealisasi sebesar 60% atau mencapai 100% dari target Triwulan III sebesar 60% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Target Triwulan III	Realisasi	% Kinerja
IKU 7.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	Persentase	85%	60%	60%	100%

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun 2025 sebagai berikut:

7.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan
1.	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan	Terlaksana	Laporan Kinerja Triwulan II telah disusun dan diunggah pada laman https://kinerja.ekon.go.id/ . Proses penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III dan pengumpulan bukti dukung juga mulai dilaksanakan.
2.	Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	Terlaksana	Proses persuratan dan tata usaha, seperti penerimaan surat masuk, verifikasi dan penandatanganan dokumen secara elektronik, serta pengiriman surat keluar

			telah dilakukan melalui SRIKANDI.
--	--	--	-----------------------------------

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah melakukan *benchmarking* dengan unit kedeputian lain mengenai layanan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kegiatan, tata kelola, dan dukungan administrasi pada masing-masing unit kerja tersebut.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan III tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI untuk mengelola persuratan secara digital juga diupayakan untuk meningkatkan kemudahan akses bekerja sekaligus memberikan kontribusi terhadap efisiensi anggaran melalui pengurangan belanja alat tulis kantor.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, tidak ada kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Namun tetap disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai.

Jakarta, 10 Oktober 2025

**Deputi Bidang Koordinasi Industri,
Ketenagakerjaan dan Pariwisata**



Rudy Salahuddin